



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/1/2023/4.8  
Tanggal Pembuatan : Desember 2022  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Pengesahan : Januari 2023  
Disahkan Oleh :

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH PROVINSI RIAU**

**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si  
NIP. 19650904 199703 1 001**

Nama Standar Operasional Prosedur : **PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS  
KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN III/d – IV/a**

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Pendidikan Min. DIII;
2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;
3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik;
6. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

**KETERKAITAN**

1. BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
2. BKN Kanreg XII Pekanbaru.

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. Aturan perundang-undangan;
2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;
3. Komputer, Printer, Scanner, Koneksi Internet, ATK.

**PERINGATAN**

1. Kompleksitas Proses Kenaikan Pangkat;
2. Keterlambatan pengusulan dari BKD Kabupaten/Kota;
3. Kesalahan dalam penerbitan PAK dan SK Fungsional.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
2. Nota usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh PPK / Kepala BKD Kab/Kota;
3. Surat pengantar kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKD Provinsi Riau.

**STANDAR PELAYANAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

STANDAR PELAYANAN: PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS KABIKOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN III/d – IV/a

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>
2.		<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
3.		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p>
4.		<p>4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</p>
5.		<p>5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p>
6.		<p>6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);</p>
7.		<p>7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Surat pengantar dan nota usul kenaikan pangkat; 2. Berkas usulan kenaikan pangkat. (berkasnya mohon diirontkan)</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Mengatur jadwal pelaksanaan penerimaan usulan kenaikan pangkat; 2. Menyusun persyaratan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat; 3. Menyusun dan mendistribusikan surat edaran kenaikan pangkat per periode kepada BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau; 4. Memfasilitasi pelaksanaan penerimaan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau; 5. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat; 6. Memfasilitasi pengembalian berkas usulan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan berkas tidak lengkap (BTL) agar dapat dilengkapi kembali; 7. Mempersiapkan surat pengantar usulan kenaikan pangkat; 8. Menyampaikan usulan berkas kenaikan pangkat kepada Kantor Regional XII Pekanbaru</p>
4.	Waktu Penyelesaian	<p>3 (tiga) bulan setelah pendistribusian surat edaran kenaikan pangkat</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>Tidak dikenakan biaya/Gratis</p>
6.	Produk Layanan	<p>Surat pengantar, nota usul dan berkas usulan kenaikan pangkat (hardcopy dan softcopy)</p>
7.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Aluran perundang-undangan; 2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat; 3. Computer/Printer/Scanner/Koneksi Internet; 4. Pensil/pensil/kertas</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan Min. Dili; 2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat; 3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau; 4. Memahami Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; 5. Mampu berkomunikasi dengan baik; 6. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran); Supervisi atasan langsung</p>
9.	Pengawas Internal	<p>Supervisi atasan langsung</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : kepankagan.bkdprovriau@gmail.com Fungsional Sub Koordinator Kepegawaian Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>6 (enam) orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan usulan kenaikan pangkat PNS Kabupaten/Kota se Provinsi Riau golongan III/d-IV/a terselenggara dengan baik dan efektif; 2. Berkas kenaikan pangkat yang diuskan tertib administrasi; 3. Personil pelaksana memiliki kompetensi secara administrasi dan teknis terkait penyusunan usulan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.</p>
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>Tersedianya fasilitas kantor sesuai dengan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Laporan kepada pimpinan instansi secara berkala.</p>